

PENINGKATAN KAPASITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN JENJANG SMP

Cynthia Petra Haumahu *¹, Hermanuel Willsty Buni²

^{1,2}Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Indonesia

*e-mail: petrahaumahu@gmail.com

Abstrak

Kekerasan di lingkungan sekolah masih menjadi permasalahan serius yang berdampak pada perkembangan psikologis dan keberhasilan belajar peserta didik. Kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pengambil kebijakan dan penggerak budaya sekolah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan kapasitas kepala sekolah jenjang SMP dalam mencegah, menangani, dan merespon kasus kekerasan melalui bimbingan teknis berbasis Bantuan Psikologis Awal (BPA). Metode pelaksanaan meliputi empat tahapan: identifikasi awal bersama kepala sekolah dan guru BK mengenai bentuk kekerasan yang sering terjadi, penyampaian materi mengenai peran kepala sekolah dan konsep BPA, diskusi serta simulasi kasus, dan evaluasi pascapelatihan melalui pre-test, post-test, dan penyusunan action plan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai konsep kekerasan, mekanisme respon awal, serta penerapan langkah Look-Listen-Link dalam BPA. Kepala sekolah juga menghasilkan rencana tindak lanjut yang mencakup pembentukan tim respon kekerasan, penyusunan SOP BPA, peningkatan sistem pelaporan ramah anak, pemetaan area rawan, pelatihan lanjutan BPA, kampanye anti-kekerasan, dan mekanisme monitoring berkelanjutan. Program PkM ini berhasil meningkatkan kesiapan kepala sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan responsif, serta memperkuat sistem perlindungan peserta didik di Kota Ambon.

Kata kunci: Kekerasan, Pencegahan, Bantuan Psikologis Awal, Bimbingan Teknis

Abstract

Violence in school settings remains a critical issue that undermines students' psychological development and academic achievement. School principals play a strategic role as key decision-makers and cultural leaders in implementing effective prevention and intervention measures. This Community Service Program (PkM) was designed to enhance the capacity of junior high school principals in preventing, managing, and responding to incidents of school violence through a technical training program grounded in Psychological First Aid (PFA). The implementation comprised four stages: (1) initial identification with principals and guidance and counseling teachers to map the prevalent forms of violence; (2) delivery of instructional content on the principal's leadership role and core concepts of PFA; (3) case-based discussions and simulations; and (4) post-training evaluation using pre-tests, post-tests, and the formulation of action plans. Results indicate a substantial improvement in participants' understanding of violence-related concepts, early response mechanisms, and the practical application of the Look-Listen-Link framework within PFA. The principals also developed comprehensive follow-up plans, including the establishment of school violence response teams, the development of PFA Standard Operating Procedures (SOPs), enhancement of child-friendly reporting systems, mapping of high-risk areas, advanced PFA training sessions, anti-violence campaigns, and sustained monitoring mechanisms. Overall, the program effectively strengthened principals' readiness to foster safe and responsive school environments and contributed to reinforcing student protection systems in Ambon City.

Keywords: School Violence, Prevention; Psychological First Aid (PFA), Technical Training

1. PENDAHULUAN

Kekerasan di lingkungan pendidikan masih menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan sekolah sebagai ruang aman bagi peserta didik. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, verbal, emosional, hingga kekerasan berbasis gender. Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2023), tercatat lebih dari 800 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah, yang seharusnya menjadi tempat tumbuh kembang anak secara optimal, masih memiliki potensi menjadi ruang yang tidak aman. Dampak kekerasan di sekolah tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga mengganggu kesejahteraan psikologis, rasa percaya diri, serta kemampuan belajar peserta didik (UNICEF, 2022). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.

Kepala sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan oleh posisi kepala sekolah sebagai **pemimpin, pengambil kebijakan, serta panutan moral dan profesional** bagi seluruh warga sekolah. Peran strategis tersebut menentukan arah kebijakan, budaya, dan iklim sekolah yang aman, tertib, dan berkarakter. Sebagai pemimpin satuan pendidikan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam **merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan sekolah** yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan. Kepala sekolah bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan sekolah sejalan dengan peraturan yang berlaku, terutama **Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015** tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Dalam konteks tersebut, kegiatan bimbingan teknis mengenai Bantuan Psikologis Awal (BPA) menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan. BPA atau Psychological First Aid merupakan pendekatan berbasis empati yang berfokus pada pemberian dukungan awal kepada individu yang mengalami tekanan emosional akibat peristiwa traumatis atau kekerasan (World Health Organization [WHO], 2011). Melalui pelatihan BPA, guru diharapkan mampu mengenali reaksi psikologis anak, memberikan dukungan yang menenangkan, serta mengarahkan siswa ke layanan rujukan profesional bila diperlukan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong pemulihan jangka pendek, tetapi juga membantu membangun daya lenting (*resilience*) peserta didik dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan (Suryani, 2022).

Kota Ambon memiliki karakter sosial dan budaya yang beragam, yang turut memengaruhi dinamika hubungan antar siswa di sekolah. Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kota Ambon (2024), kasus perundungan dan kekerasan verbal masih ditemukan di beberapa sekolah menengah pertama. Melihat kondisi tersebut, kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kota Ambon dan tenaga ahli bimbingan serta konseling melalui kegiatan pengabdian masyarakat menjadi sangat strategis. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman guru terhadap konsep BPA, tetapi juga memperkuat kapasitas mereka dalam membangun sistem sekolah yang lebih peduli dan tanggap terhadap isu kekerasan.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pengabdian bertema “Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Jenjang SMP di Kota Ambon” menjadi sangat penting. Melalui bimbingan teknis yang terencana, para kepala sekolah mendapatkan bekal teoritis dan praktis untuk melakukan deteksi dini, intervensi awal, serta tindak lanjut terhadap kasus kekerasan di sekolah. Program ini sejalan dengan semangat Permendikbudristek Nomor 46

Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan mendukung kesejahteraan psikologis peserta didik.

2. METODE

2.1. Metode tahapan kegiatan dalam program PKM ini memuat tahapan sebagai berikut :

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam bimbingan Teknis kepada Kepala Sekolah jenjang SMP:

- Tahap 1:** Data awal dikumpulkan melalui diskusi dengan kepala sekolah dan guru Bimbingan Konseling terkait jenis-jenis permasalahan kekerasan yang sering muncul di lingkungan sekolah. Dari hasil identifikasi tersebut, peserta bimtek ditetapkan terdiri dari perwakilan kepala sekolah SMP yang memiliki peran strategis dalam pembinaan siswa.
- Tahap 2:** Melakukan bimbingan teknis yang ditujukan pada kepala-kepala sekolah di jenjang SMP, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya peningkatan kapasitas atau peran kepala sekolah dalam mengenali, mencegah, dan menangani kekerasan di sekolah. Selain itu, tahap ini juga menjelaskan konsep dasar **Bantuan Psikologis Awal (BPA)** sebagai pendekatan praktis dalam memberikan dukungan psikososial awal kepada siswa
- Tahap 3:** Melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan bimbingan teknis, meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta bimtek dalam mencegah serta menangani kekerasan di sekolah. Termasuk membuat (*action plan*) sebagai bentuk pedoman implementasi program pasca bimtek.
- Tahap 4:** Hasil kegiatan kemudian disusun dalam bentuk **laporan pengabdian** yang mencakup proses pelaksanaan, hasil capaian, serta rekomendasi tindak lanjut.

2.2. Tahapan Kegiatan yang akan di lakukan sebagai bentuk Solusi pada mitra

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai bentuk solusi yang ditawarkan kepada mitra.

No	Sesi	Tujuan	Waktu	Aktivitas
1	Pembukaan	- Menjelaskan tujuan kegiatan dan membangun suasana partisipatif - Untuk menumbuhkan keakraban antar narasumber dan peserta bimtek	30 Menit	- Pembukaan dan Pengantar oleh Pihak Dinas Pendidikan - Perkenalan Tim PKM - Ice breaking - Memberikan kuesioner untuk mengukur pengetahuan awal peserta bimtek terkait kekerasan di sekolah
2.	Penyampaian Materi 1	Memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya peran kepala sekolah dalam mengatasi dan mencegah tindak	30 menit	Penyampaian Materi 1 : Pentingnya peran kepala sekolah

		kekerasan di Sekolah		
2	Penyampaian Materi 2	Memberikan keterampilan awal menangani peserta didik korban kekerasan di sekolah	60 Menit	Penyampaian materi 2 : Bantuan Psikologis Awal (BPA). Keterampilan menangani peserta didik korban kekerasan di Sekolah.
3	Diskusi dan Simulasi Kasus	Melatih kemampuan analisis dan respon terhadap kasus kekerasan di sekolah	60 Menit	Menyusun strategi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan Sekolah
4	Evaluasi dan Penutupan	Mengukur pemahaman peserta dan merumuskan tindak lanjut	60 Menit	- Peserta menuliskan komitmen pada <i>kartu deklarasi</i> dan dikembalikan sebagai pengingat - Kuesioner Post-test, dan evaluasi diri - Lembar <i>action plan</i> (termasuk penguatan fungsi guru BK)

2.3. Partisipasi Mitra

Partisipasi Mitra (Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Ambon) dalam kegiatan ini adalah dengan mendukung penuh kegiatan PkM dengan judul “Peningkatan Kapasitas Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Jenjang SMP” dengan memfasilitasi lokasi serta mempersiapkan peserta yaitu para kepala Sekolah jenjang SMP untuk mengikuti bimbingan teknis.

2.4. Evaluasi dan Rencana Program Berkelanjutan

Program PkM ini merupakan program berkelanjutan yang direncanakan ditindaklanjuti dengan kegiatan pendampingan bagi siswa ABK di SD Negeri 1 Amahusu yang membutuhkan, sehingga bisa menciptakan pendidikan yang optimal. Kemudian juga bisa melakukan indentifikasi bagi siswa-siswa baru yang bergabung pada sekolah tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Sekolah

Fenomena kekerasan di lingkungan sekolah masih menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan sekolah sebagai ruang aman bagi peserta didik. Data KemenPPPA (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 800 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di satuan pendidikan, mencerminkan bahwa sekolah masih memiliki potensi menjadi lingkungan yang penuh risiko. Kekerasan tersebut tidak hanya muncul dalam bentuk fisik, tetapi juga verbal, relasional,

emosional, bahkan kekerasan berbasis gender. Kondisi ini sejalan dengan laporan UNICEF (2022) yang menegaskan bahwa kekerasan di sekolah berdampak pada kesehatan mental, menurunkan rasa percaya diri, dan memengaruhi kemampuan belajar siswa. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan sistematis dan berbasis kapasitas untuk menekan angka kekerasan sekaligus memperkuat sistem perlindungan peserta didik.

Sebagai pemimpin satuan pendidikan, kepala sekolah memegang peran yang sangat strategis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai penentu arah kebijakan, pengawas implementasi regulasi, dan role model bagi seluruh warga sekolah. Peran tersebut telah diatur dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dan diperkuat oleh Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yang menekankan kewajiban sekolah untuk menyediakan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang komprehensif. Sejalan dengan itu, penelitian Suryani (2022) menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh besar terhadap budaya sekolah, termasuk terciptanya lingkungan belajar yang aman, ramah, dan bebas kekerasan.

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui bimbingan teknis mengenai Bantuan Psikologis Awal (BPA) menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kepala sekolah sebagai garda depan perlindungan siswa. BPA—sebagai pendekatan dukungan psikososial awal yang dikembangkan WHO (2011)—menekankan tiga langkah inti: *Look, Listen, Link*. Melalui pelatihan ini, kepala sekolah dibekali kemampuan mengenali tanda-tanda tekanan psikologis pada siswa korban kekerasan, memberikan respon awal yang empatik, serta menghubungkan siswa dengan layanan profesional bila diperlukan. Dalam sesi diskusi dan simulasi, peserta mampu mengidentifikasi pola kekerasan yang sering terjadi di sekolah SMP di Ambon, sebagaimana juga dilaporkan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon (2024), yang menyatakan bahwa perundungan verbal masih menjadi masalah utama di beberapa sekolah menengah pertama.

Hasil PKM menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman kepala sekolah mengenai bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme penanganan, serta pentingnya respon awal psikologis untuk melindungi siswa dari kasus kekerasan. Evaluasi melalui pre-test dan post-test memperlihatkan peningkatan pengetahuan dan kesiapan praktis dalam menerapkan BPA. Selain itu, peserta merumuskan rencana tindak lanjut seperti penyusunan *action plan* penanganan kekerasan, penguatan fungsi guru BK, dan pengembangan sistem pelaporan internal untuk siswa. Secara keseluruhan, PKM ini memperkuat kapasitas kepala sekolah dalam mewujudkan budaya sekolah yang aman, sehat, dan responsif terhadap kebutuhan psikologis siswa—sejalan dengan mandat regulasi nasional dan praktik terbaik internasional (UNICEF, 2022; WHO, 2011).

Proses Bimbingan Teknis Kepala Sekolah Jenjang SMP dilihat pada gambar 1 di bawah ini :



Gambar 1. Proses Bimbingan Teknis Kepala Sekolah Jenjang SMP

3.2 Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi ini disusun dalam format **Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (Action Plan) Berbasis BPA** Penjabarannya sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Respon Kekerasan Sekolah

Tim ini terdiri dari kepala sekolah, guru BK, wali kelas, dan guru terlatih BPA. Tugasnya melakukan asesmen awal menggunakan prinsip Look-Listen-Link, mendokumentasikan kasus, menentukan rujukan ke profesional, dan mengevaluasi kasus setiap bulan.

2. Penyusunan SOP Bantuan Psikologis Awal (BPA)

SOP memuat langkah Look (mengamati korban), Listen (mendengar empatik), Link (menghubungkan dengan BK atau profesional). SOP harus mudah diakses dan dipasang di area strategis sekolah.

3. Penerapan Kotak Aduan & Sistem Pelaporan Ramah Anak

Sistem pelaporan fisik dan digital disediakan agar siswa dapat melapor dengan aman. Mekanisme ini mendukung tahap 'Link' dalam BPA.

4. Pemetaan Area Rawan Kekerasan di Sekolah

Sekolah memetakan area rawan seperti lorong, kantin, toilet. Intervensi dilakukan melalui patroli guru, pemasangan CCTV, dan poster edukasi.

5. Pelatihan Lanjutan BPA untuk Guru & Wali Kelas

Pelatihan berkala dilakukan mengenai deteksi dini, komunikasi empatik, simulasi BPA, dan teknik mencegah victim blaming.

6. Kolaborasi dengan Psikolog atau Lembaga Perlindungan Anak

Sekolah melakukan MoU dengan psikolog/puskesmas untuk rujukan profesional kasus yang membutuhkan intervensi lanjutan.

7. Program Kelas Anti-Kekerasan & Penguatan Karakter

Sesi rutin dilakukan mengenai anti-bullying, role-play BPA, empati, dan resolusi konflik.

8. Monitoring dan Evaluasi Bulanan

Evaluasi dilakukan melalui laporan bulanan jumlah kasus, kategori, respon guru, dan revisi SOP jika diperlukan.

9. Poster Edukasi BPA & Kampanye Anti-Kekerasan

Poster BPA dan pesan anti-kekerasan dipasang untuk meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah.

10. Penyusunan Deklarasi Sekolah Aman

Siswa dan guru menandatangani komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengenai “Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Jenjang SMP”, dapat disimpulkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pemahaman kepala sekolah mengenai bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya, serta langkah respons awal yang tepat menggunakan pendekatan Bantuan Psikologis Awal (BPA). Evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesiapan peserta dalam mencegah dan menangani kekerasan di sekolah. Selain itu, peserta menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret, seperti pembentukan tim respon kekerasan, penyusunan SOP BPA, penguatan sistem pelaporan ramah anak, dan pengembangan program kampanye anti-kekerasan. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kapasitas kepala sekolah dan mendukung terwujudnya lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan bebas kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abin, S. (2014). Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- American Psychological Association. (2020). Standards for Educational and Psychological Testing. Washington, DC: APA.
- Dinas Pendidikan Kota Ambon. (2024). Laporan Tahunan Kasus Perundungan dan Kekerasan Verbal di Sekolah. Ambon: Disdik Kota Ambon.
- Friend, M., & Bursuck, W. D. (2019). Including Students with Special Needs: A Practical Guide for Classroom Teachers. Pearson Education.
- Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C. (2022). Exceptional Learners: An Introduction to Special Education. Pearson.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pendidikan Khusus.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Profil Kekerasan terhadap Anak Tahun 2023. Jakarta: KemenPPPA.
- Lerner, J. W., & Johns, B. H. (2015). Learning Disabilities and Related Disabilities: Strategies for Success. Cengage Learning.
- Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan.
- Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Suryani, L. (2022). School Culture and Violence Prevention: The Role of Principal Leadership. *Journal of Educational Safety*, 3(2), 55–68.
- UNESCO. (2021). Inclusive Education: Ensuring Access and Learning for All. UNESCO Publishing.
- UNICEF. (2022). Ending Violence in Schools: Global Status Report. New York: UNICEF.

World Health Organization. (2011). Psychological First Aid: Guide for Field Workers. WHO.